



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua limpahan Rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ini dapat diselesaikan tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pencapaian visi, misi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban kepada publik. Laporan ini bersifat tahunan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mencapai “*good governance*”.

LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2025 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini, Akhirnya kami berharap semoga LKjIP ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Selatan.

Palembang, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan



Prof. Dr.H.Achmad Tarmizi, Ph.D
Pembina Utama (IV/e)
NIP.19660609 1995121001

*LKjIP Tahun Anggaran 2025
Dinas Sosial Prov. Sumatera Selatan*

SISTEMATIKA LKjIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I - Pendahuluan,

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum tentang Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Bab II - Rencana Strategis dan Rencana Kinerja,

Menjelaskan muatan rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2024-2026 dan rencana kerja tahunan 2025.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja,

Menjelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran.

Bab IV -Penutup,

Menjelaskan berisi kesimpulan tinjauan secara umum mengenai permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan sosial di Indonesia saat ini memasuki fase krusial sebagai fondasi awal menuju Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam UU No. 59 Tahun 2024. Fokus utama diarahkan pada transformasi manusia untuk menciptakan masyarakat yang berdaya saing dan sejahtera. Beberapa tantangan mendasar yang menjadi fokus perhatian dalam perencanaan pembangunan sosial saat ini. Isu strategis dan arah kebijakan Dinas Sosial di tingkat provinsi kini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 yang selaras dengan RPJMN 2025–2029. Fokus utamanya adalah transformasi perlindungan sosial untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Isu strategis merupakan kondisi mendasar yang jika tidak ditangani akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat di daerah. Beberapa isu utama meliputi:

- Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Sinkronisasi data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk meminimalkan *exclusion* dan *inclusion error* dalam penyaluran bantuan.
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui integrasi program pemberdayaan dan perlindungan sosial.
- Peningkatan Kualitas Rehabilitasi Sosial: Ketersediaan dan standarisasi pelayanan di Panti Sosial milik pemerintah provinsi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Kesiapsiagaan Bencana: Penguatan mitigasi dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam maupun sosial (seperti lumbung sosial di daerah rawan).
- Pemberdayaan Kelompok Rentan: Kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas, lansia, dan komunitas adat terpencil melalui program kewirausahaan sosial.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan wajib bidang sosial menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Transformasi Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat: Memastikan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif bagi seluruh kelompok umur, dari anak-anak hingga lansia.
- Penguatan Jejaring Kemitraan (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS): Mengoptimalkan peran Karang Taruna, TKSK, dan Pekerja Sosial Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput.
- Modernisasi Layanan Sosial Berbasis Digital: Digitalisasi sistem pengaduan dan pemantauan bantuan sosial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Integrasi Layanan Terpadu: Kolaborasi lintas sektor (seperti dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan) untuk intervensi kemiskinan yang lebih komprehensif, termasuk penanganan stunting serta membangun Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance. Selanjutnya, sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan perlu menyampaikan laporan atas pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Laporan. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi alat kendali dan pemacu kinerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial, serta sebagai sarana bagi stakeholder dalam memberikan masukan perbaikan bagi kinerja Dinas Sosial.

I.I DATA UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, pada Pasal 4 menyatakan Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan membantu Gubernur melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 adalah :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan pedesaan, penanganan kemiskinan perkotaan, penanganan kemiskinan desa-desa terpencil, desa tertinggal, bantaran sungai dan perbatasan antar provinsi / kabupaten;
- e. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sosial;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan kemiskinan;

- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

I.II STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menunjang kinerja Dinas Sosial dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial, maka penataan susunan organisasi dengan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Provinsi Sumatera Selatan pada pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Sekretaris membawahi;

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada Dinas Sosial dan melaksanakan urusan di bidang umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan dan informasi serta penyusunan program dan melaksanakan administrasi keuangan.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi

1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam;
2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial;
3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi;

1. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang;
3. Seksi Rehabilitasi, Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia; mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial anak, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial, pengelolaan data korban penyalahgunaan NAPZA/HIV/AIDS (ODHA) dan korban perdagangan orang serta korban tindak kekerasan.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial; membawahi;

1. Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
2. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, penyuluhan/informasi, kegiatan pemberdayaan perorangan dan keluarga serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial

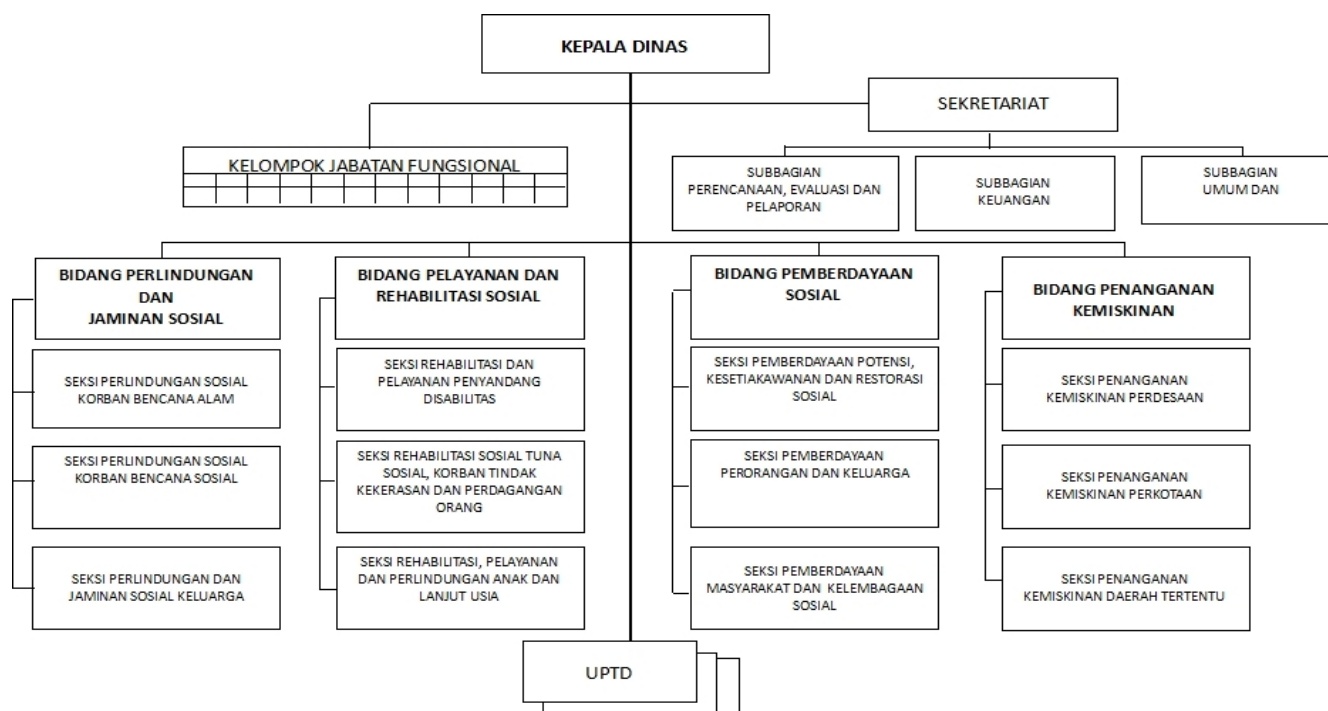
f. Bidang Penanganan Kemiskinan membawahi;

1. Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan;
2. Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan;
3. Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu; mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan kemiskinan perdesaan, penanganan kemiskinan perkotaan dan penanganan kemiskinan daerah tertentu.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

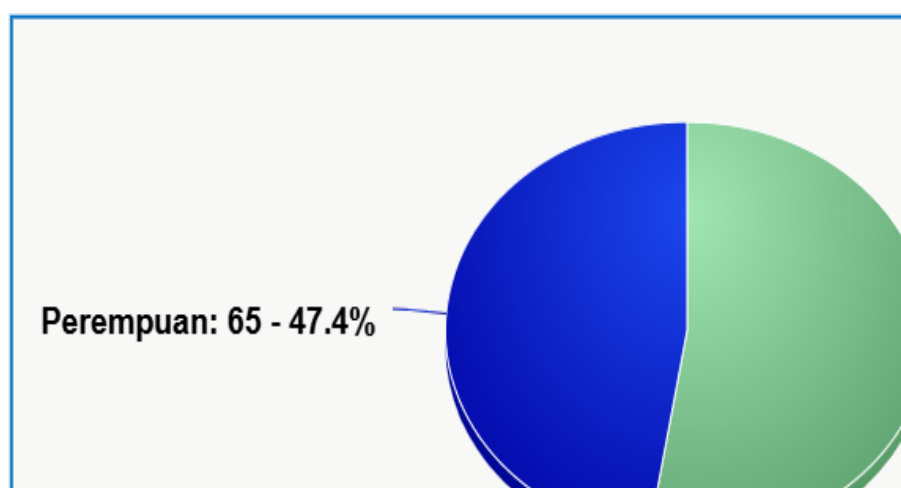
Bagan Struktur Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan



I.III DATA UMUM JUMLAH PEGAWAI ASN DAN NON ASN

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

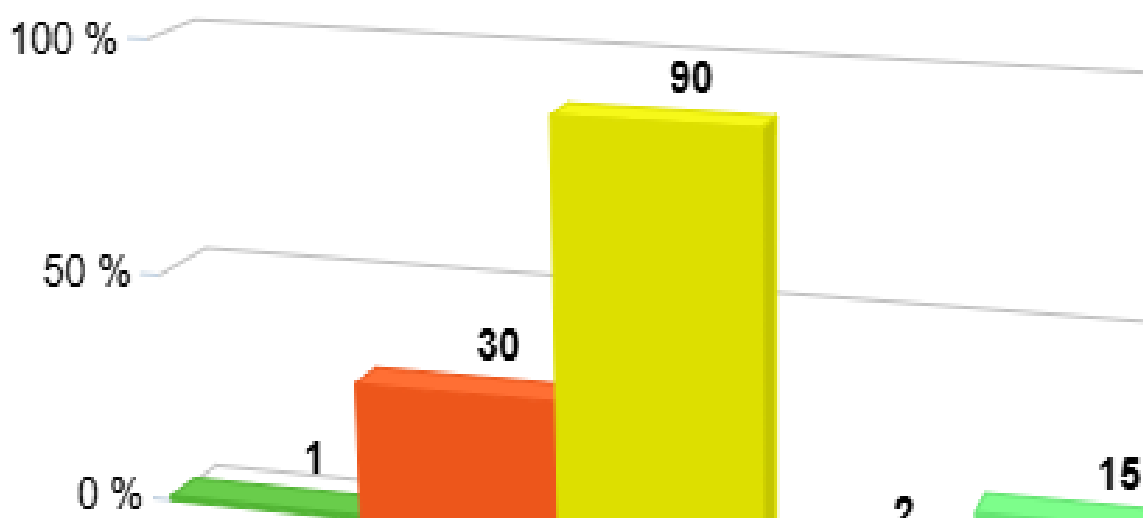
No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki - laki	72	52,43
2.	Perempuan	65	47,56
Jumlah		137	



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S3	1	0,54
2.	S2	30	16,21
3.	S1	90	48,64
4.	D4	2	1,08
5.	D3	15	8,10
6.	SLTA	47	25,40
Jumlah		185	

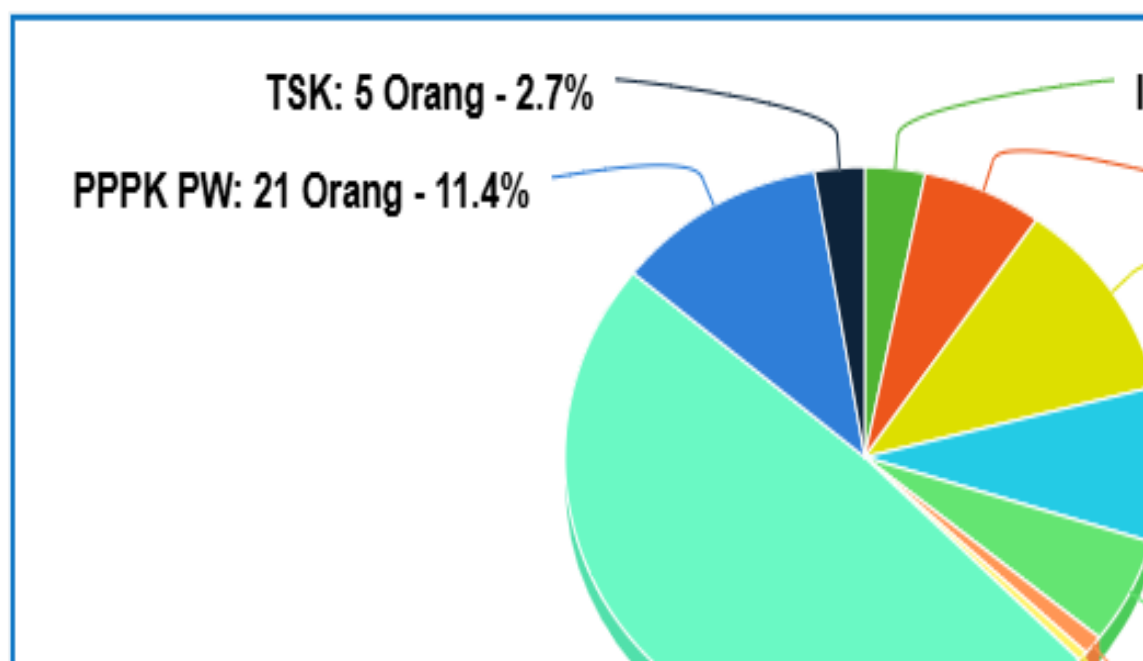
Komposisi Pegawai Dinas Sosial



Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

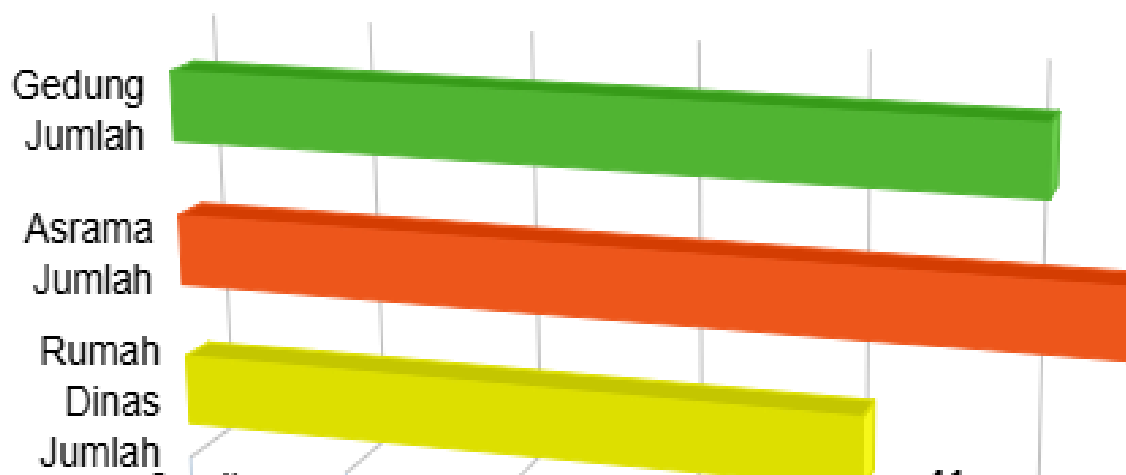
No	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase
1.	III/a	6	3,24
2.	III/b	12	6,48
3.	III/c	21	11,35
4.	III/d	16	8,64
5.	IV/a	11	5,94
6.	IV/b	2	1,08
7.	IV/e	1	0,54
8.	PPPK	90	48,64
9.	PPPK/PW	21	11,35
10.	TKS	5	2,70
Jumlah		185	

Komposisi Pegawai Dinas Sosial



I. IV. Sarana dan Prasarana

No	Lokasi	Sarana dan Prasarana		
		Gedung	Asrama	Rumah Dinas
1.	Dinas Sosial Provinsi	1 Unit	-	3 Unit
2.	UPTD PSR Gepeng dan dan ODGJ	8 Unit	7 Unit	8 Unit
3.	UPTD PSR LU	18 Unit	32 Unit	11 Unit
4.	UPTD PSR AMPK	14 Unit	6 Unit	5 Unit
5.	UPTD PSR Disabilitas Sensorik	3 Unit	2 Unit	3 Unit
6.	UPTD PSRWTS	6 Unit	7 Unit	1 Unit
7.	UPTD PSR ABH	1 Unit	7 Unit	10 Unit
	Jumlah	51 Unit	61 Unit	41 Unit



I.V Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan terdapat UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pembentukan ,susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Gubernur. UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk uraian tugas dan fungsi UPTD yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 18 tahun 2018.

- 1. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Orang dengan Gangguan Jiwa** mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi, bimbingan mental, dan pemeliharaan fisik serta penyantunan terhadap gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa agar mampu mandiri dan berperan aktif serta dapat hidup secara wajar.
- 2. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial** mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial wanita tuna sosial, wanita korban tindak kekerasan, wanita rawan sosial ekonomi, wanita klasifikasi nakal dan wanita remaja akibat pergaulan bebas, agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
- 3. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan serta penyantunan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana alam, anak terisolasi/anak komunitas adat terpencil, anak terlantar) agar mampu mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum** mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Nakal (AN) agar



mampu berperan aktif dan dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

5. UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pemeliharaan serta perlindungan terhadap lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara wajar.

6. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial komprehensif bagi penyandang disabilitas sensorik (tunarungu, tunanetra, tunawicara) untuk meningkatkan kemandirian melalui bimbingan sosial, mental, fisik, serta pelatihan keterampilan (vokasional) dan pendidikan formal/non-formal, serta dukungan keluarga, agar mereka mampu berfungsi sosial secara wajar di masyarakat

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagai suatu instansi sektor publik, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan mempunyai rencana yang strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2024 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasarannya akan diuraikan dalam bab ini.

A. PENDAHULUAN

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Perencanaan strategik membutuhkan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*oppurtunities*), dan tantangan / kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur–unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan Visi dan Misi serta strategi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan mengandung Visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya serta menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya.

Dengan visi, misi, dan strategis yang jelas dan tepat, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas

kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Perencanaan strategis ini setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan : (1) dimana Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan berada sekarang, (2) kemana arah tujuan, dan (3) bagaimana untuk menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana stratejik mendefinisikan visi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, misi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi di dalam memenuhi visinya. Pertanyaan bagaimana kita menuju ke sana dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Dari uraian singkat di atas, unsur – unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta strategi pencapaian tujuan / sasaran berupa program dan kegiatan.

B. RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program– program pembangunan kesejahteraan sosial yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024–2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendekatan partisipatif.

Di samping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 3 (tiga) tahun mendatang, yakni meningkatnya citra aparat, masyarakat dan Provinsi Sumatera Selatan. Bagi manajemen Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, RENSTRA dipandang sebagai :

- Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan;
- Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
- Merupakan alat untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.

Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan maka RENSTRA ini memuat: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan yang selanjutnya diuraikan di dalam program dan kegiatan. Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2024 – 2026 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2024 – 2026 tersebut.

PERNYATAAN TUJUAN, VISI DAN MISI

Tujuan Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah :

“ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif “

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2025-2029; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2025-2029; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan.

SASARAN STRATEGIS

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan. Sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing – masing tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Dinas Sosial telah menetapkan sasaran jangka menengah tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut : □

- Meningkatnya pemberdayaan sosial; □
- Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan; □
- Meningkatnya Rehabilitasi sosial; □
- Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan; □
- Meningkatnya Rehabilitasi sosial; □
- Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial; □
- Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana; □
- Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan.

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis Gubernur Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan. Gubernur Sumatera Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan urusan sosial yaitu sebagai berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Angka Kemiskinan	Presentase penduduk sumsel yang hidup di bawah garis kemiskinan	Dinas Sosial	BPS
2	Gini Rasio	Angka Ratio Gini di Prov. Sumatera Selatan	Dinas Sosial	BPS

Sedangkan Target untuk Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2025
1	Angka Kemiskinan	9.37 - 10.37
2	Gini Rasio	0.316 - 0.320

Untuk pencapaian Target Indikator Utama pada Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2025
1	Angka Kemiskinan	9.85
2	Gini Rasio	0.298

2. INDIKATOR KINERJA DAERAH.

Indikator Kinerja Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan RPD Tahun 2025 s.d 2026, untuk Triwulan Pertama sampai dengan Triwulan Ketiga, Secara umum Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diwujudkan dengan indikator sebagai berikut :



LKjIP Tahun Anggaran 2025
Dinas Sosial Prov. Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Daerah Pada Triwulan Pertama sampai dengan Triwulan Ketiga Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dengan Target Kinerja sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)
1	3	7
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	56,60
2.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100,00
3.	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	10
4.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
5.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
6.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
7.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
8.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100

Indikator Kinerja Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan pada periode Triwulan Keempat dengan memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2025-2029; menyesuaikan dengan RPJMD Tahun 2025 s.d 2030 yang telah disahkan pada Oktober 2025, Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif, dengan Indikator Kinerja dan target tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase (%)	57.22%

Sedangkan pencapaian Target Indikator Kinerja Daerah Ikesos pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase(%)	57,22%	57,63%	100,72%

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) atau Ikesos adalah instrumen statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak. Di Indonesia, data terkait hal ini secara resmi dirilis secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat. Komponen Utama Penyusun Indeks Berdasarkan standar BPS dan Kementerian Sosial, variabel utama yang dipantau meliputi:

- **Kependudukan & Pendidikan:** Meliputi struktur demografi dan tingkat pendidikan masyarakat umum.
- **Kesehatan & Lingkungan:** Akses terhadap pelayanan kesehatan, kualitas perumahan, dan sanitasi.
- **Ketenagakerjaan & Ekonomi:** Tingkat pengangguran, pendapatan rumah tangga, serta pola konsumsi.
- **Perlindungan Sosial:** Cakupan jaminan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi masyarakat rentan (PMKS).

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) untuk Tahun Anggaran 2025. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang dapat dicapai dalam Tahun 2025. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja 2025 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik – baiknya dan sebagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun ini.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkat Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,22

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 21.593.143.000	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 357.851.000	APBD
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 36.180.000	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 9.785.030.000	APBD
5.	Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	Rp. 8.270.174.902	APBD
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 936.000.000	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 98.000.000	APBD

Palembang, 29 Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Dra. Hj. NENG MUHAIBA, M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651112 199512 2 001

D. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Total Pagu Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **41.076.378.902.-** (*Empat puluh satu miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah*) yang terdiri atas :

Belanja Operasi	: Rp. 39.881.818.902.-
Belanja Pegawai	: Rp. 16.940.865.000,- (42,48%)
Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 22.940.953.902,- (57,52%)
Belanja Bantuan Sosial	: Rp. -
 Belanja Modal	 : Rp. 1.194.560.000,-
Belanja Modal Peralatan & Mesin	: Rp. 674.560.000,- (56,47%)
Belanja Modal aset lainnya	: Rp. 520.000.000,- (43,53%)

Belanja tersebut terdiri atas 7 Program dan 19 Kegiatan dan 93 sub kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b) Program Pemberdayaan Sosial
- c) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- d) Program Rehabilitasi Sosial
- e) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- f) Program Penanganan Bencana
- g) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Sedangkan total pagu Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN / Dekonsentrasi tidak lagi dialokasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJATAHUN 2025

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Sosial tahun 2024-2026. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum target indikator yang ditetapkan bisa dicapai pada tahun ini dan sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

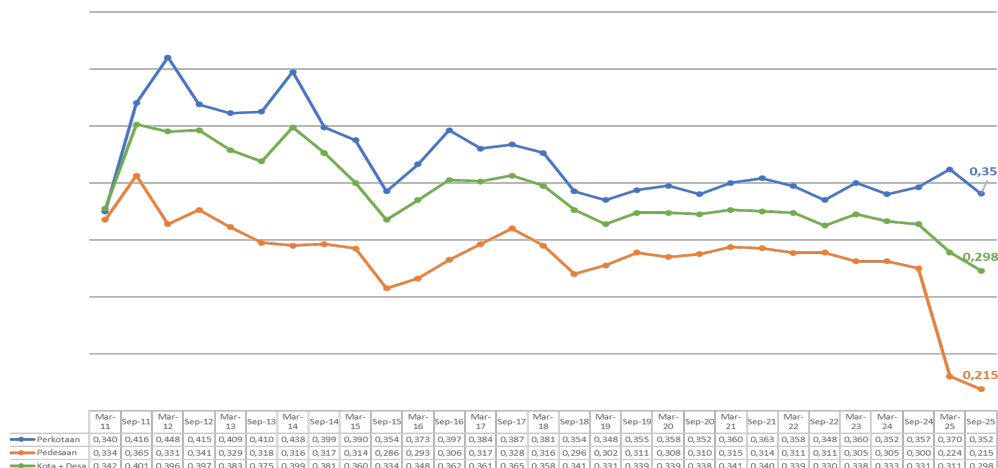
1. Indikator Kinerja Utama Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2026.

NO	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Target Terhadap 2026	%Capaian
1	Angka Kemiskinan	10.37	9.85	105.28 %	10.58	107.41%
2	Gini Ratio	0.320	0.298	93.13 %	0.308	96.75%

3.1 Gini Ratio

Gini Ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan dimana nilainya berkisar antara 0 dan 1. Ratio Gini = 0 mengindikasikan ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya, setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Sementara Rasio Gini = 1 menunjukkan terjadinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna, artinya pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Semakin mendekati 0 ketimpangan pendapatan semakin rendah dan semakin mendekati 1 ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

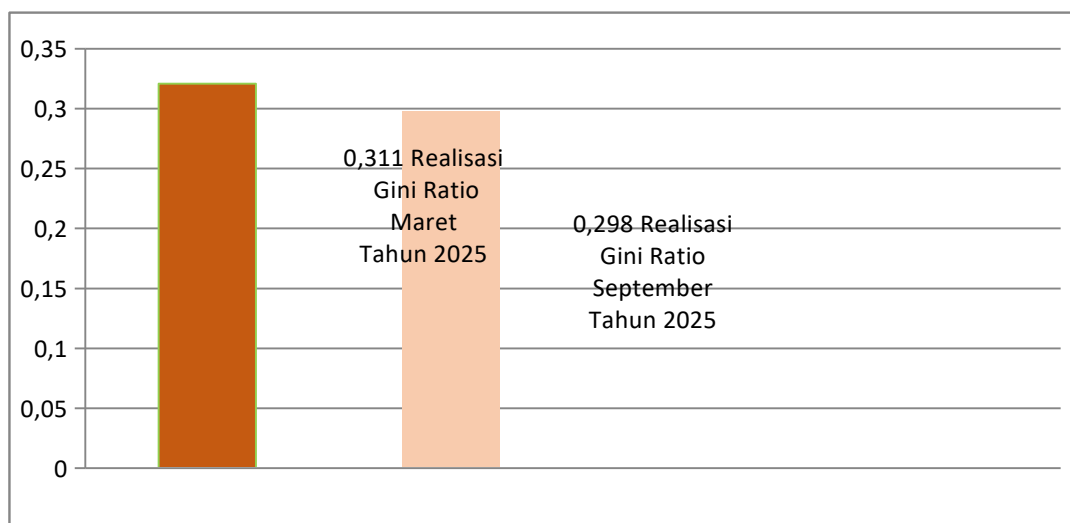
Untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pendapatan, BPS menggunakan indikator *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* Provinsi Sumatera Selatan sejak Maret 2011 tampak fluktuatif dan cenderung menurun selama periode 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Maret 2011 *Gini Ratio* sebesar 0,342, pada September 2025 angka *Gini Ratio* hanya sebesar 0,298. Ini menunjukkan selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sumatera Selatan.



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 1 Perkembangan *Gini Ratio*, Maret 2011–September 2025

Dalam enam bulan terakhir atau pada periode Maret 2025–September 2025 *Gini Ratio* Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,311 keadaan Maret 2025 menjadi 0,298 pada September 2025. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada September 2025 sebesar 0,352, turun 0,018 poin dibanding Maret 2025 yang sebesar 0,370. Sebaliknya untuk daerah pedesaan, *Gini Ratio* pada September 2025 tercatat sebesar 0,215, turun 0,009 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2025 sebesar 0,224.



Grafik 1.1 Gini Ratio Tahun 2025

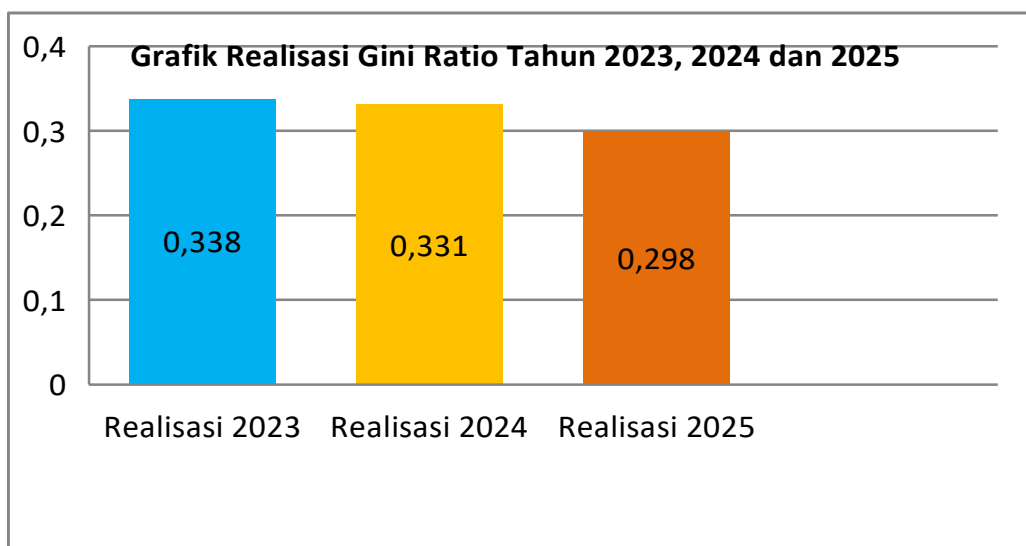
Penurunan Gini ratio di Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada grafik diatas. Tercapainya target penurunan Ratio Gini di Provinsi Sumatera Selatan menandakan terjadinya perbaikan pemerataan pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penyebab dari menurunnya Gini ratio antara lain :

1. Perluasan jangkauan dan penambahan jumlah penerima bantuan sosial bagi masyarakat miskin/rentan. Pada tahun 2025 jumlah masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial sebanyak 2.444.966 jiwa yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota (dipedesaan maupun perkotaan), mengalami kenaikan sebesar 77,99% atau 537.942 jiwa jika dibandingkan capaian pada tahun 2024 sebanyak 1.907.024 jiwa. Dengan adanya perluasan jangkauan dan penambahan jumlah masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin/rentan tersebut. dan menguatkan perekonomian mereka.
2. Penambahan indeks bantuan sosial bagi penerima PKH dan Program Sembako, Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan bantuan sosial PKH, Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) khusus bagi Ibu Hamil dan Anak Balita pada tahun 2025 mengalami penambahan indeks sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| a. Ibu Hamil | Rp. 750.000.- / Triwulan |
| b. Anak usia dini (0-6 tahun) | Rp. 750.000.- / Triwulan |
| c. SD | Rp. 225.000.- / Triwulan |
| d. SMP | Rp. 375.000.- / Triwulan |
| e. SMA | Rp. 500.000.- / Triwulan |
| f. Disabilitas Berat | Rp. 600.000.- / Triwulan |
| g. Lanjut Usia (60 thn atas) | Rp. 600.000.- / Triwulan |

3. Penambahan indeks bantuan untuk program sembako yang semula sebesar Rp.110.000/KPM/bulan, maka pada Program Sembako indeks meningkat menjadi Rp.200.000/KPM/bulan, Total Per Tahun: Setiap keluarga menerima bantuan total Rp2.400.000 per tahun. Melalui 2 mekanisme yaitu, Melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Biasanya dicairkan setiap dua bulan sekali dengan nominal Rp400.000 per tahap. Melalui PT Pos Indonesia: Biasanya dicairkan setiap tiga bulan sekali (per triwulan) dengan nominal Rp600.000 per tahap. Bantuan sosial program sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan bahan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya. Bantuan sosial pangan ini diberikan dalam bentuk non tunai (cashless) melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan sehingga KPM dapat menggunakan untuk memperoleh bahan makanan pangan di e-Warong yang tersedia/ yang ditunjuk.

Penurunan Gini ratio di Provinsi Sumatera Selatan merupakan hasil dari berbagai intervensi kebijakan yang sudah digulirkan pemerintah tidak hanya menyentuh kalangan miskin dan rentan, tetapi juga kelas menengah. Beberapa program yang sudah diberikan antara lain perluasan penerima manfaat PKH dan bantuan sembako, dan lain-lain. Tak hanya itu, pemerintah juga sudah mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok UMKM agar tetap bertahan dari dampak pandemi. (Perbandingan target nasional).



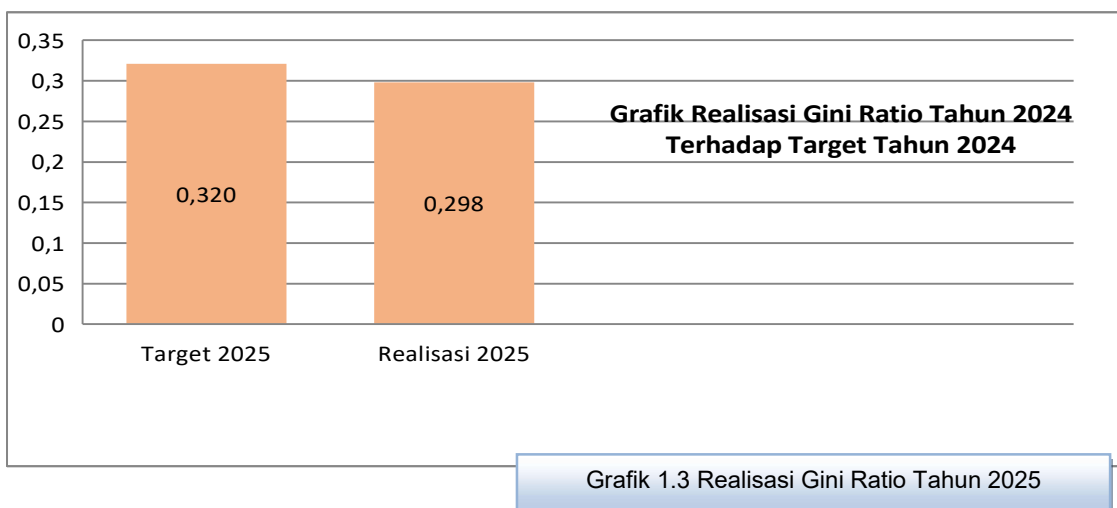
Grafik 1.2 Perbandingan Realisasi Gini Ratio Tahun 2023 s.d 2025

Berdasarkan grafik diatas Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan pada kurun waktu dari tahun 2023-2025 mengalami penurunan fluktuasi,dalam satu tahun terakhir atau pada periode Maret 2023-September 2023 Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,338 keadaan Maret 2023 menjadi 0,331 keadaan September 2024 atau turun 0,007 poin, sedangkan penurunan yang cukup besar juga terjadi untuk periode September 2025 yaitu sebesar 0,033 poin terhadap periode sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Provinsi Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat direalisasikan semakin baik di masyarakat.

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2025	18,40	36,68	44,92	100
September 2025	19,32	36,98	43,70	100
Perdesaan				
Maret 2025	24,43	44,34	31,22	100
September 2025	24,99	44,33	30,68	100
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2025	21,27	39,33	39,41	100
September 2025	21,90	39,72	38,38	100

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS Prov.Sumsel

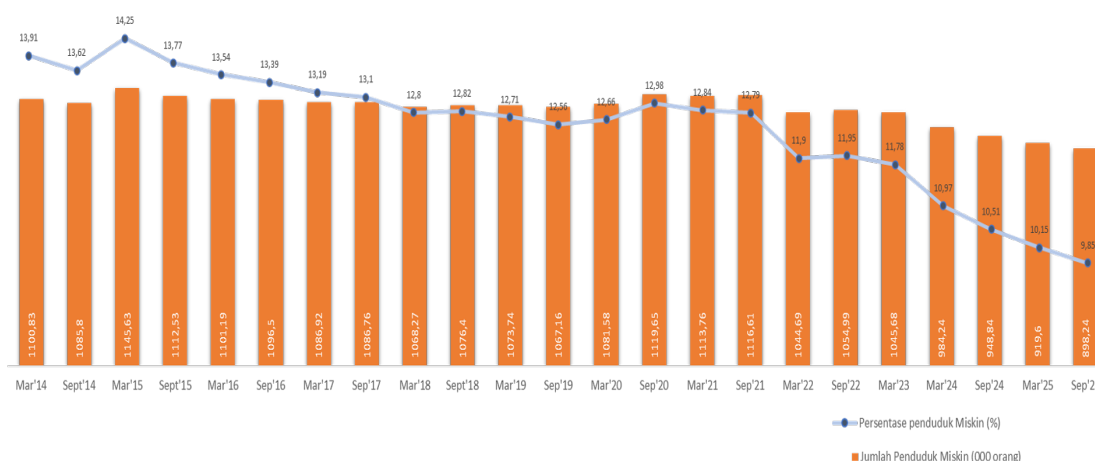
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 21,90 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 19,32 persen dan untuk daerah perdesaan 24,99 persen, yang juga berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.



Berdasarkan grafik diatas realisasi tahun 2025 Gini Ratio sebesar 0,298 melampaui capaian target tahun 2025 sebesar 0,320. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gini Ratio Nasional (Pusat) pada bulan September 2025 sebesar 0,363. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,298 maka angka ini masih berada dibawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menurunkan angka ketimpangan pendapatan yang ada di daerah melalui program dan kegiatan yang bertujuan mengurangi/menurunkan angka kemiskinan yang terjadi. Harapan kedepan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan melalui Dinas Sosial dapat semakin menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

3.2 Angka Kemiskinan

Secara umum kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan, dalam periode Maret 2014-September 2025, menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Selatan menurun dari 1.100,83 ribu orang di Maret 2014 menjadi 898,24 ribu orang pada September 2025. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 13,91 persen menjadi 9,85 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2014 sampai dengan September 2025 disajikan pada Gambar 1.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan

Penduduk miskin September 2025 turun jika dibandingkan dengan Maret 2025 Jumlah penduduk miskin provinsi Sumatera Selatan September 2025 mencapai 898,24 ribu orang atau turun 21,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2025 yang berjumlah 919,60 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 9,85 persen, mengalami penurunan 0,30 persen poin terhadap persentase Maret 2025. Sedangkan untuk Persentase penduduk miskin secara Nasional pada September 2025 sebesar 8,25 persen, menurun 0,22 persen poin terhadap Maret 2025 dan menurun 0,32 persen poin terhadap September 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 23,36 juta orang, menurun 0,49 juta orang terhadap Maret 2025 dan menurun 0,70 juta orang terhadap September 2024.

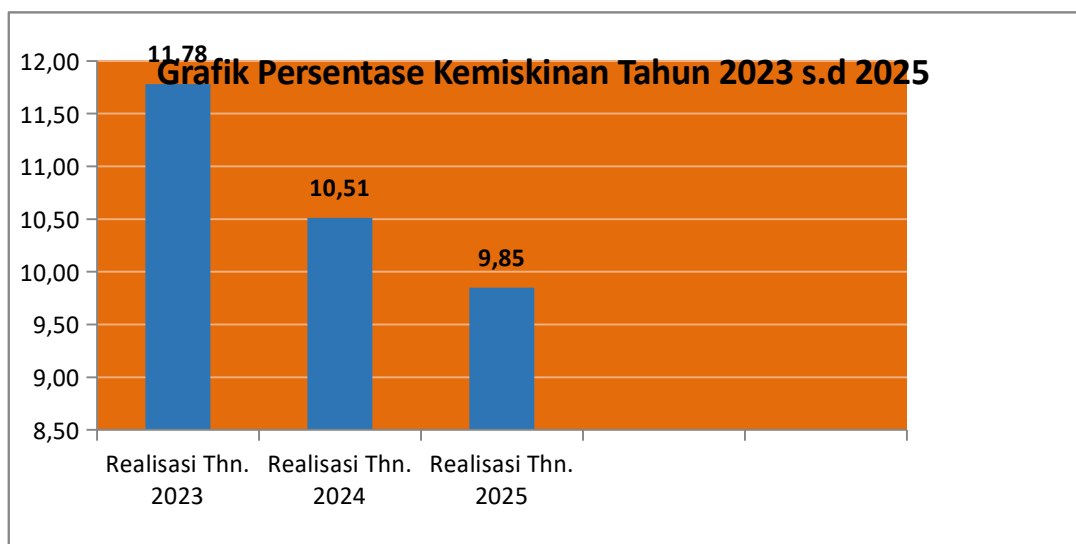
Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2025– September 2025

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2025	314,49	9,10
September 2025	310,56	8,91
Perdesaan		
Maret 2025	605,12	10,79
September 2025	587,68	10,43
Total		
Maret 2025	919,60	10,15
September 2025	898,24	9,85

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode Maret 2025-September 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebesar 3,9 ribu orang dari 314,49 ribu orang Maret 2025 menjadi 310,56 ribu orang September 2025. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2025 menurun sebesar 0,19 persen dari semula 9,10 persen pada Maret 2025 menjadi 8,91 persen pada September 2025. Penduduk miskin di perdesaan September 2025 menurun sebanyak 17,4 ribu orang dibandingkan Maret 2025 dari 605,12 ribu orang menjadi 587,68 ribu orang. Persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2025 menurun sebesar 0,36 persen poin dari semula 10,79 persen menjadi 10,43 persen pada September 2025.

Sedangkan untuk tingkat nasional Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2025–September 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat sebesar 0,09 juta orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,40 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 6,73 persen menjadi 6,60 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 11,03 persen menjadi 10,72 persen.



Grafik 1.4 Perbandingan Persentase Kemiskinan Tahun 2022 s.d 2024

Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebagaimana yang tergambar pada grafik diatas, maka dapat dilihat angka kemiskinan terus mengalami penurunan, di tahun 2023 sebesar 11,78% sedangkan di tahun 2024 sebesar 10.51% mengalami penurunan capaian sebesar 1,27%. Sama halnya pada tahun 2025 persentase kemiskinan sebesar 9,85% kembali mengalami penurunan sebesar 0.66% bila dibandingkan persentase kemiskinan pada tahun 2024. Jika dilihat dari grafik capaian persentase angka kemiskinan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2025 - September 2025 antara lain adalah:

1. Ekonomi Sumatera Selatan triwulan 3-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,22 persen (y-on-y), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,04 persen.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan Agustus 2025 sebesar 3,69persen, turun dibanding TPT Februari 2025 (3,89 persen).
3. Pengeluaran konsumsi rumah tangga Sumsel pada Triwulan 3 2025 meningkat 4,98 persen (y-on-y).
4. Inflasi Sumsel September 2025 relatif terkendali sebesar 3,44 persen (y on y).

5. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumsel September 2025 sebesar 127,77 sedangkan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) September 2025 sebesar 131,72.
6. Beberapa komoditas yang mempengaruhi kemiskinan tercatat mengalami kenaikan harga, antara lain beras (naik 4,21%), daging ayam ras (naik 4,45%), mie instan (naik 5,66%) dan rokok kretek filter (naik 10,05%) sedangkan yang mengalami penurunan harga adalah telur ayam ras (turun 1,6%).
7. Berbagai program bansos dikucurkan, antara lain PKH, BPNT/Sembako dan PBI di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan (sumber: Dinas Sosial Prov. Sumsel). Selain itu peningkatan MBG yang disalurkan tercermin dari jumlah SPPG yang meningkat dari sebanyak 3 SPPD di bulan Maret 2025 menjadi 134 SPPG di bulan September 2025 (sumber: BGN).
8. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang di Sumsel pada September 2025 (48,12%) meningkat dari TPK Hotel Bintang pada Maret 2025 (31,46%).

Keberhasilan penurunan persentase angka kemiskinan merupakan kerja sama bersama antara seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Sosial tapi dari seluruh aspek stakeholder yang ada. Penurunan persentase angka kemiskinan ini salah satunya didukung melalui perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup. Dinas Sosial merupakan salah satu perangkat daerah yang ikut berperan dalam penurunan angka kemiskinan disamping instansi terkait lainnya. Adapun program kegiatan yang mendukung terjadinya penurunan persentase angka kemiskinan ini antara lain:

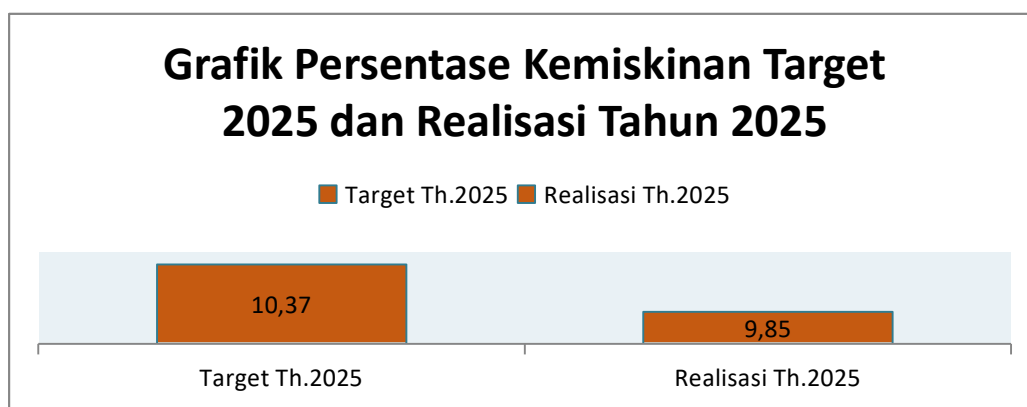
1. Program Nasional dari Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 293.940 Keluarga Miskin Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Tujuan dari program ini untuk :
 - Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat sangat miskin;

- Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan);
- Mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib pendidikan dasar 12 Tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Kriteria dari PKH ini adalah Rumah Tangga yang memiliki anak balita, anak usia sekolah Ibu hamil, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia berusia 60 tahun keatas. Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan pada 17 Kabupaten/Kota yaitu Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, Muba, OKI, OI, Lahat, Musi Rawas, Empat Lawang, Muara Enim, OKU, OKUS, OKUT, PALI dan Muratara.

2. Bantuan Program Sembako kepada warga miskin di Provinsi Sumatera Selatan di 17 Kabupaten/Kota. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdaftar sebesar Rp. 200.000/bulan sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat akan kebutuhan pangan yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan Sosial Pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya berupa beras dan telur.
3. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Miskin di wilayah 17 Kabupaten/Kota sebanyak 1.500 KK. Bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan/bahan usaha kepada masyarakat yang sudah memiliki embrio usaha namun terhambat perkembangannya sehingga diharapkan dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
4. Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, Melalui pelayanan sosial didalam panti, diluar panti dan bantuan sosial (Asistensi Lanjut Usia/Bantuan Langsung Tunai) bagi lansia non potensial serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi lansia potensial.

5. Program Perlindungan Sosial Anak Pelayanan di dalam panti, diluar panti dan bantuan sosial bagi anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
6. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), pemberian bantuan cash transfer bagi penyandang disabilitas berat dan bantuan alat bantu, penjangkauan kedaruratan/bebas pasung bagi penyandang disabilitas mental (orang dengan gangguan jiwa)
7. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial
Pemberian bantuan logistik/bufferstock dan pelayanan psikososial bagi korban bencana alam maupun bencana sosial.



Grafik 1.5 Persentase Kemiskinan Target 2025 dan Realisasi Tahun 2025

Berdasarkan grafik Capaian Persentase Kemiskinan Tahun 2025 dapat dijelaskan, pada akhir tahun 2025 realisasi persentase angka kemiskinan sebesar 9.85% dari yang ditargetkan sebesar 10,37% hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,52% atau target penurunan angka kemiskinan menjadi **1 (satu) digit** di Provinsi Sumatera Selatan telah tercapai dibandingkan periode sebelumnya.

Berikut ini beberapa program kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama terkait Penurunan Persentase Angka Kemiskinan :

- I. Program Pemberdayaan Sosial dengan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Provinsi.
- II. Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia terlantar di dalam panti.
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti.
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.
- III. Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- IV. Program Penanganan Bencana dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Permakanan dan Sandang.
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi.
 - Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan.
 - Pelayanan Dukungan Psikososial.
- V. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Adapun realisasi dari indikator kinerja daerah untuk periode Triwulan Pertama sampai dengan Triwulan Ketiga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)	REALISASI (%)
1	3	7	
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	56,60	51,86
2	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100,00	100
3	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	10	12,50
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
6	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	100

Dalam tahun 2025 capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan ke III sangat baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari 8 (Delapan) Indikator Kinerja diatas hanya terdapat 1 indikator yang belum tercapai namun indikator lainnya telah mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran dan indikator yang tersebut dapat dilihat melalui penjelasan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, target 56,60% dan realisasi 51,82 %, meliputi :

- Program Nasional dari Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 293.940 Keluarga Miskin Penerima Manfaat (KPM).

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin.

Tujuan dari program ini untuk :

- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat sangat miskin;
- Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan);
- Mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib pendidikan dasar 12 Tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Kriteria dari PKH ini adalah Rumah Tangga yang memiliki anak balita, anak usia sekolah Ibu hamil, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia berusia 60 tahun keatas. Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan pada 17 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Peran pendamping PKH sangat penting dalam mendorong dan memotivasi KPM untuk lebih mandiri. Peran dan keterampilan pendamping dalam memfasilitasi sangat menentukan progresivitas KPM PKH dampingannya. Para pendamping Program PKH dibekali berbagai keterampilan pendampingan yang akan meningkatkan kapasitas mereka dalam mendampingi KPM. Peningkatan kapasitas SDM pelaksana PKH dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan teknis (Bimtek), dan bimbingan pemantapan kebutuhan program. Kepekaan, keterampilan, dan semangat seorang pendamping sangat menentukan kegigihan usahanya mengantarkan graduasi KPM PKH dampingannya.

Kedepannya lebih ditekankan untuk optimalisasi peran pendamping dalam rangka percepatan rasio graduasi KPM yang lebih tinggi.

- Program Sembako yang diberikan kepada 433.959 KPM, sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat akan pangan yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan di 17 Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan Sosial Pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Program Sembako merupakan upaya pemerintah untuk menransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai (cashless) melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan sehingga KPM dapat menggunakan untuk memperoleh bahan makanan pangan di e-Warong yang tersedia. Tujuan dari program Sembako adalah sebagai berikut;

- Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
- Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Sedangkan manfaat dari program Sembako adalah :

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); dan
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Dengan adanya program Sembako, diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM dalam hal makanan, sehingga dapat membuat sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Selain itu, penambahan jenis bahan pangan yang diberikan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat, terutama untuk menekan angka stunting di Indonesia.

Penyaluran dana program Sembako dilakukan melalui mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli komoditas bahan pangan yang telah ditentukan untuk program Sembako di Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) dan tidak dapat diambil tunai. Bila komoditas yang dapat dibelanjakan sebelumnya beras dan atau telur, pada Program Sembako ditambahkan dengan komoditas bahan pangan yang mengandung karbohidrat (jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian lainnya), protein hewani (daging ayam, daging, ikan), protein nabati (tahu, tempe dan kacang-kacangan) dan vitamin mineral (sayuran dan buah-buahan).

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial
Pemberian bantuan logistik/bufferstock dan pelayanan psikososial bagi korban bencana alam maupun bencana sosial.
- Bantuan beras bagi warga yang terdampak PPKM di Provinsi Sumatera Selatan, Bantuan ini merupakan Program Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin yang terdampak kebijakan PPKM di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah warga yang menerima bantuan sebanyak 100.000 KK, setiap KK mendapatkan bantuan sebesar 5 Kg beras.

2. Meningkatnya pelayanan sosial di dalam panti, dengan indikator Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan target 100%, realisasi 100%.

Terlampauinya target ini dikarenakan adanya dukungan Program sebagai berikut:

- Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap 50 orang anak nakal dan anak yang berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial

rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum Inderalaya" melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan. Dari 50 anak yang dibina tersebut sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri.

Adapun hasil dari bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagai berikut :

- Montir motor sebanyak 29 orang, dari jumlah tersebut 15 orang telah bekerja dibengkel motor, 8 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 6 orang masih mencari peluang kerja.
 - Las Listrik sebanyak 21 orang, dari jumlah tersebut 12 orang telah bekerja dibengkel las, 6 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 3 orang masih mencari peluang kerja.
- Tahun 2025 UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial (PSRWTS) telah melaksanakan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna sosial melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan meliputi keterampilan salon dan menjahit. Bimbingan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan, masing-masing angkatan sebanyak 25 orang, Siswi menerima materi selama 5 bulan per-angkatan. Klien yang dibina sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri. Dari 25 orang siswi tersebut;
- 45 orang telah membuka usaha menjahit sendiri dirumah dengan peralatan yang berasal dari bantuan stimulan mesin jahit dari dari UPTD PSRWTS.
 - 5 orang lainnya telah membuka usaha salon didaerahnya masing-masing dengan peralatan yang berasal dari dari bantuan stimulan UPTD PSRWTS.

3. Meningkatnya dukungan PSKS terhadap penanganan PMKS dengan target 10,00% dan realisasi sebesar 12,50%.

Tercapainya sasaran dan indikator ini didukung oleh berapa unsur PSKS yang aktif dalam pelayanan Kesejahteraan Sosial maupun

PSKS yang mendapatkan peningkatan Kapasitas dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

- a. TKSK sebanyak 236 orang
- b. Penyuluh Sosial sebanyak 30 Orang
- c. LKS sebanyak 100 Orang dan
- d. PSM sebanyak 200 orang

4. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti dengan indikator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh kebutuhan dasarnya, target 100% dan realisasi 100%.

➤ Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik memberikan pelayanan kepada 12 orang anak penyandang disabilitas di dalam panti berupa :

- pendidikan formal (SDLB-A, SMPLB-A, SMALB-A)
- bimbingan fisik (olahraga, pemeliharaan kesehatan)
- bimbingan mental (keagamaan/ rohani, budi pekerti dan pramuka)
- bimbingan sosial (resosialisasi)
- bimbingan Keterampilan (bermain musik, menyanyi, pijat urut, membuat sapu, membuat kemoceng)
- pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan rujukan ke rumah sakit pemerintah.

Tujuan dari layanan yang diberikan antara lain :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
2. Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan memberikan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Penyandang Disabilitas di Panti Sosial ini diharapkan mampu melaksanakan fungsi sosialnya, dapat mengembangkan potensi secara optimal, menjadi pribadi mandiri, percaya diri dan produktif.

5. Meningkatnya Kemandirian Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti dengan indikator Persentase Anak Terlantar yang memperoleh kebutuhan dasarnya, target 100% dan realisasi 100%.

- Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap 50 orang anak nakal dan anak yang berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum Inderalaya" melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan. Dari 50 anak yang dibina tersebut sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri.

Adapun hasil dari bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagai berikut :

- Montir motor sebanyak 29 orang, dari jumlah tersebut 15 orang telah bekerja dibengkel motor, 8 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 6 orang masih mencari peluang kerja.
- Las Listrik sebanyak 21 orang, dari jumlah tersebut 12 orang telah bekerja dibengkel las, 6 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 3 orang masih mencari peluang kerja.

6. Meningkatnya Kemandirian Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti dengan indikator Persentase Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh kebutuhan dasarnya, target 100% dan realisasi 100%.

Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar dalam UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita melalui pelayanan , bimbingan mental sosial kepada 200 orang Lanjut Usia (Jompo) terlantar yang terbagi pada Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Inderalaya (80 orang), Panti sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang (60 orang), Lanjut Usia Harapan Kita Lubuk linggau (35 orang), Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Musi Rawas (25 orang).

Bimbingan sosial ini dilaksanakan dalam bentuk 2 kegiatan, yang pertama dilaksanakan dalam ruangan pembinaan melalui jadwal yang ada, sedangkan yang kedua dilaksanakan di wisma-wisma yang ada. Pembinaan ini merupakan media yang sangat efektif bagi petugas panti untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul baik secara individu

maupun kelompok. Penyaluran bakat keterampilan (kegiatan ini bertujuan untuk mengisi waktu luang dengan melakukan hal-hak yang bermanfaat seperti membuat kerajinan sapu bulu ayam, keset kaki dan merangkai bunga).

7. Meningkatnya Kemandirian Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti dengan indikator Persentase Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh kebutuhan dasarnya, target 100% dan realisasi 100%.

- Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada 180 orang gelandangan pengemis dan orang terlantar dengan psikotik (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berupa bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut. Tujuan dari layanan di panti sosial PR-PGOT ini antara lain:
 - Terpenuhinya kebutuhan dasar klien panti.
Membantu klien panti mencapai kualitas hidup yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
 - Gelandangan, pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa tidak berkeliaran di jalanan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

8. Meningkatnya Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi dengan indikator Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi, target 100% dan realisasi 100%.

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial
Pemberian bantuan logistik/bufferstock dan pelayanan psikososial bagi korban bencana alam maupun bencana sosial.
- Bantuan beras bagi warga yang terdampak PPKM di Provinsi Sumatera Selatan, Bantuan ini merupakan Program Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin yang terdampak kebijakan PPKM di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah warga yang menerima bantuan sebanyak 100.000 KK, setiap KK mendapatkan bantuan sebesar 5 Kg beras.

Adapun realisasi dari indikator kinerja daerah untuk periode Triwulan Keempat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase(%)	57,22%	57,63%	100,72%

Pencapaian Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) yang positif pada tahun 2025 dipengaruhi oleh sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang stabil dan efektivitas kebijakan perlindungan sosial yang lebih terintegrasi. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mendorong tercapainya indikator kesejahteraan tersebut:

1. Peningkatan Kualitas Hidup (IPM) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,88 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh Angka Harapan Hidup, Meningkat menjadi 74,15 tahun berkat akses kesehatan yang lebih merata. Pendidikan, Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang terus membaik.
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Target penurunan kemiskinan menjadi fokus utama dalam APBN 2025. Hingga September 2025, persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25%, atau berkurang sekitar 0,70 juta orang dibandingkan periode yang sama di tahun 2024.
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%. Beberapa indikator pendukungnya meliputi: PDB Per Kapita: Mencapai Rp83,7 juta (sekitar USD 5.083), yang meningkatkan daya beli masyarakat. Inflasi Terkendali, Berada pada level 2,72% (yoy) per November 2025, menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil bagi warga kelas menengah ke bawah.
4. Transformasi Program Bantuan Sosial, Pemerintah melakukan penyusunan ulang anggaran bansos agar lebih fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Keberhasilan ini juga didukung oleh perbaikan data melalui integrasi sistem untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan meminimalkan penyalahgunaan.
5. Penguatan Infrastruktur Sosial & Kesehatan, Pemerintah mempercepat peningkatan kelas RSUD di daerah terpencil agar 80% kasus penyakit

dapat ditangani langsung tanpa perlu rujukan ke kota besar, sehingga mengurangi biaya sosial bagi masyarakat.

B. Keberhasilan/Kendala Peningkatan Kinerja dan Analisis Efisiensi Sumber Daya.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2024	2025
1	Meningkatnya Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	81,92 %	91,62 %
2	Meningkatnya Panti Sosial yang menyelenggarakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100%
3	Meningkatnya Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PMKS	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	12,50 %	12,50 %
4	Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
5	Meningkatnya Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
6	Meningkatnya Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%

7	Meningkatnya Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
8	Meningkatnya Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat bahwa dalam dua tahun terakhir capaian indikator Dinas Sosial telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar 91.62%, mengalami peningkatan daripada tahun 2024 sebesar 81,92% hal tersebut sudah melebihi dari target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 9,7%. Peningkatan capaian kinerja ini disebabkan meningkatnya jangkauan pelayanan dan perluasan akses pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui program kegiatan yang dilaksanakan. Adanya peningkatan capaian ini salah satunya didukung melalui perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup.
- Sedangkan untuk indikator yang termasuk kedalam SPM Bidang Sosial capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dan ditahun 2025 capaiannya juga 100%.

Keberhasilan peningkatan kinerja dalam rangka menurunkan persentase angka kemiskinan merupakan kerja sama bersama antara seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Sosial tapi dari seluruh aspek *stakeholder*

yang ada. Oleh karena itu banyak hal yang harus diperbaiki agar kinerja di kemudian hari dalam mencapai tujuan penurunan persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan bisa tercapai secara maksimal, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Belum optimalnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mengingat DTKS ini merupakan data rujukan yang digunakan dalam penyaluran bantuan pemerintah maka perlu dilakukan perbaikan data tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan, agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan sehingga banyaknya bantuan sosial belum tepat sasaran antara lain disebabkan karena Basis Data Terpadu (BDT) belum terupdate secara berkelanjutan. Dalam hal untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI, serta BPS untuk mensinkronisasikan Basis Data yang saat ini terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Indonesia (DTSEIN) yang resmi menggantikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial di Indonesia mulai tahun 2025. Sistem ini bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala (setiap 3 bulan) untuk memastikan data tetap akurat terhadap perubahan status warga (seperti kelahiran, kematian, atau peningkatan taraf ekonomi). Masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dengan mengusulkan atau menyanggah data melalui sistem yang disediakan
2. Belum optimalnya pencapaian SPM Bidang Sosial. Hal ini dikarenakan Prioritas Anggaran, Penguatan kelembagaan dan pelaksanaan SPM bidang sosial belum menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi birokrasi di beberapa daerah. Kurangnya Kompetensi: Masih rendahnya pemahaman aparatur di tingkat daerah mengenai tata cara penerapan dan pelaporan SPM yang sesuai standar pusat. Untuk mengatasi kendala tersebut Dinas Sosial Menyusun dan menyosialisasikan Petunjuk Teknis (Juknis) operasional yang sederhana agar mudah diimplementasikan oleh petugas di lapangan khususnya pelaksanaan SPM Bidang Sosial di daerah Kabupaten/Kota kemudian Membentuk Tim Penerapan SPM di tingkat daerah yang melibatkan lintas sektor (Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Keuangan) serta Memastikan anggaran SPM bidang

sosial menjadi prioritas wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

C. Capaian Penghargaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial memperoleh penghargaan sebagai *"TERBAIK I Perangkat Daerah Paling Tinggi TKDN Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025"*.



B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah Pagu Anggaran untuk menunjang kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dari Dana APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 41.076.378.902,-** (*Empat puluh satu miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah*) terdiri dari :

1. DANA APBD Tahun 2025

Jumlah dana APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 41.076.378.902,- dengan realisasi per-desember 2025 sebesar Rp. 37.550.772.283,- (91,42%) yang terdiri dari :

- ✓ Belanja Operasi sebesar Rp.39.881.818.902,- (*Tiga puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 36.371.104.736,- atau sebesar (91,20%).
- ✓ Belanja Modal Rp. 1.194.560.000,- (*Satu miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 1.179.667.547,44,- atau sebesar (98,75%)

Adapun uraian kegiatan selama tahun 2025 di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, meliputi :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI /Des.2025(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.593.143.000	18.402.026.856,70	85,22
Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.100.000	135.207.104,00	82,39
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.243.750.000	15.545.399.762,00	85,21
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	14.725.506,00	98,17
Administrasi Umum Perangkat daerah	1.163.080.926	918.264.929,00	78,95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.184.000.000	1.077.431.019,00	91,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	588.000.000	564.759.536,70	96,05
Pengadaan Barang Milik Daerah	110.212.074	110.164.000,00	99,96

LKjIP Tahun Anggaran 2025
Dinas Sosial Prov. Sumatera Selatan

	Penunjang Urusan Pemerintah			
Program Pemberdayaan Sosial		357.851.000	315.817.040,00	88,25
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	357.851.000	315.817.040,00	88,25
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		36.180.000	35.195.346,00	97,28
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	36.180.000	35.195.346,00	97,28
Program Rehabilitasi Sosial		9.785.030.000	9.619.197.403,74	98,31
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.038.385.000	1.017.706.091,00	98,01
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.575.775.000	1.564.451.457,00	99,28
	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.958.000.000	2.922.549.361,74	98,80
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2.318.900.000	2.291.881.627,00	98,83
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.893.970.000	1.822.608.867,00	96,23
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		8.270.174.902	8.177.759.093,00	84,47
	Pengangkatan Anak antar WNI	39.200.000	27.408.260,00	69,92
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	54.600.000	48.827.980,00	89,43
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	131.000.000	102.734.969,00	78,42
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan	8.045.374.902	7.998.787.884,00	99,42

	Ekonomi Masyarakat			
Program Penanganan Bencana		936.000.000	909.448.284,00	97,16
	Penyediaan Permakanan	300.000.000	279.731.000,00	93,24
	Penyediaan Sandang	80.000.000	76.100.000,00	95,13
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	150.000.000	148.744.945,00	99,16
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	247.000.000	246.211.759,00	99,68
	Pelayanan Dukungan Psikososial	159.000.000	158.660.580,00	99,79
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		98.000.000	91.328.260,00	93,19
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	24.000.000	23.992.000,00	99,97
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	48.000.000	41.400.000,00	86,25
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	26.000.000	25.936.260,00	99,75

Hasil dan manfaatnya yang di peroleh, antara lain :

- Tersalurkannya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi warga miskin di 17 Kabupaten/Kota sebanyak 1.500 KPM. Bantuan tersebut diberikan dalam berbagai jenis usaha yang disesuaikan dengan potensi lokal, keterampilan penerima manfaat, serta kebutuhan pasar di masing-masing wilayah, Jenis bantuan usaha yang paling banyak diberikan adalah Usaha Sembako, dengan jumlah penerima mencapai 412 KK, diikuti oleh Usaha Gorengan sebanyak 167 KK, dan Usaha Modal/Tekwan sebanyak 141 KK. Selain itu, bantuan UEP juga mencakup usaha sektor kuliner dan jasa skala mikro lainnya seperti usaha dagang makanan (106 KK), usaha jualan kue (76 KK), usaha bakso/mie ayam (64 KK), usaha dagang sayur (64 KK), usaha sarapan pagi (63 KK), usaha counter pulsa (60 KK), usaha es blender (86 KK), hingga usaha pangkas rambut dan usaha steam motor. Ragam jenis usaha ini menunjukkan pendekatan pemberdayaan yang adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin di daerah

- Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar dalam UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita melalui pelayanan, bimbingan mental sosial kepada 200 orang Lanjut Usia (Jompo) terlantar yang terbagi pada Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Inderalaya (80 orang), Panti sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang (60 orang), Lanjut Usia Harapan Kita Lubuk linggau (35 orang), Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Musi Rawas (25 orang).

Bimbingan sosial (kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk 2 kegiatan, yang pertama dilaksanakan dalam ruangan pembinaan melalui jadwal yang ada, sedangkan yang kedua dilaksanakan di wisma-wisma yang ada. Pembinaan ini merupakan media yang sangat efektif bagi petugas panti untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul baik secara individu maupun kelompok.

Penyaluran bakat keterampilan (kegiatan ini bertujuan untuk mengisi waktu luang dengan melakukan hal-hak yang bermanfaat seperti membuat kerajinan sapu bulu ayam, keset kaki dan merangkai bunga.

- Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada 180 orang gelandangan pengemis dan orang terlantar dengan psikotik (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berupa bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut. Tujuan dari layanan di panti sosial PR-PGOT ini antara lain:

- Terpenuhinya kebutuhan dasar klien panti.

Membantu klien panti mencapai kualitas hidup yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

- Gelandangan, pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa tidak berkeliaran di jalanan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

- Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik memberikan pelayanan kepada 12 orang anak penyandang disabilitas di dalam panti berupa :

- pendidikan formal (SDLB-A, SMPLB-A, SMALB-A)
- bimbingan fisik (olahraga, pemeliharaan kesehatan)
- bimbingan mental (keagamaan/ rohani, budi pekerti dan pramuka)
- bimbingan sosial (resosialisasi)
- bimbingan Keterampilan (bermain musik, menyanyi, pijat urut, membuat sapu, membuat kemoceng)

- pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan rujukan ke rumah sakit pemerintah.

Tujuan dari layanan yang diberikan antara lain :

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
 - b. Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan memberikan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Penyandang Disabilitas di Panti Sosial ini diharapkan mampu melaksanakan fungsi sosialnya, dapat mengembangkan potensi secara optimal, menjadi pribadi mandiri, percaya diri dan produktif.
- Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap 50 orang anak nakal dan anak yang berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum Inderalaya" melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan. Dari 50 anak yang dibina tersebut sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri. Adapun hasil dari bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagai berikut :
- Montir motor sebanyak 29 orang, dari jumlah tersebut 15 orang telah bekerja dibengkel motor, 8 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 6 orang masih mencari peluang kerja.
 - Las Listrik sebanyak 21 orang, dari jumlah tersebut 12 orang telah bekerja dibengkel las, 6 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 3 orang masih mencari peluang kerja.
- Tahun 2025 UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial (PSRWTS) telah melaksanakan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna sosial melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan meliputi keterampilan salon dan menjahit. Bimbingan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan, masing-masing angkatan sebanyak 25 orang. Pada angkatan 1 (pertama) siswi hanya menerima materi selama 2 bulan dikarenakan

pada saat itu masa puncaknya pandemi covid-19 sehingga mereka akhirnya dipulangkan kerumah masing-masing.

Pada angkatan ke-2 (dua) siswi full menerima materi keterampilan selama 5 bulan, dimana sebelumnya diadakan rapid test terlebih dahulu. Klien yang dibina sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri. Dari 25 orang siswi tersebut

- 20 orang telah membuka usaha menjahit sendiri dirumah dengan peralatan yang berasal dari bantuan stimulan mesin jahit dari dari UPTD PSRWTS.
 - 5 orang lainnya telah membuka usaha salon didaerahnya masing-masing dengan peralatan yang berasal dari dari bantuan stimulan UPTD PSRWTS.
- Terbinanya anak terlantar sebanyak 130 orang terdiri atas : 30 orang di panti anak amal bhakti sekayu MUBA, 30 org di panti anak budi mulya lubuk linggau MURA, 20 orang di Panti anak tunas harapan kayu agung OKI dan 50 orang anak remaja putus sekolah di Panti sosial bina remaja Indralaya di Indralaya Ogan Ilir.
- Anak- anak yang berada di 3 panti anak dengan usia mereka yang bervariasi mereka dapat mengenyam pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan menengah atas (SLTA)
 - Sedangkan anak remaja putus sekolah di Panti Sosial bina remaja Indralaya mereka diberikan bimbingan mental sosial dan bimbingan keterampilan menjahit, salon dan montir motor dengan hasil sebagai berikut:
 - Jumlah peserta keterampilan montir motor sebanyak 16 orang, dari jumlah tersebut 10 orang membuka usaha sendiri dan 6 orang bekerja dibengkel.
 - Keterampilan menjahit berjumlah 18 orang, dari jumlah tersebut : 5 orang telah bekerja pada usaha konveksi dan 13 orang membuka usaha sendiri.
 - Keterampilan Salon 16 orang dari jumlah tersebut 9 orang telah bekerja disalon-salon, sedangkan 6 orang membuka usaha sendiri, melanjutkan pendidikan sebanyak 1 orang.
 - Pengasramaan dan penyediaan kebutuhan dasar (permakanan) penyediaan peralatan kebersihan/bahan pembersih, penyediaan

tenaga pengasuh dan keamanan di 3 panti anak, penyediaan tenaga pengasuh dan keamanan di panti anak, penyediaan tenaga bimbingan spiritual, penyediaan tenaga narasumber/ tenaga instruktur.

➤ Bantuan Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2025

1. Bantuan pengembangan usaha ini diberikan sebanyak 15 Paket di 3 (tiga) Kabupaten/Kota diantaranya Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) dengan 7 Jenis Usaha dengan rincian antara lain :
 - a. Usaha Jualan Sembako sebanyak 5 (lima) buah;
 - b. Usaha Jualan Gorengan sebanyak 1 (satu) buah;
 - c. Usaha Makanan sebanyak 3 (tiga);
 - d. Usaha Pembuatan Tahu Kuning sebanyak 1 (satu) buah;
 - e. Usaha Menjahit sebanyak 2 (dua) buah;
 - f. Usaha Servis Elektronik sebanyak 2 (dua) buah;
 - g. Usaha Jualan Aksesoris sebanyak 1 (satu) buah;
2. Bantuan alat bantu untuk tahun 2025 sebanyak 44 Orang penyandang disabilitas di 6 (enam) Kabupaten/Kota diantaranya Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan 4 Jenis alat bantu sebagai berikut :
 - a. Kursi Roda sebanyak 30 (Tiga Puluh) buah;
 - b. Alat Bantu Dengar sebanyak 10 (Sepuluh Buah) buah;
 - c. *Prothese Kaki* sebanyak 2 (Dua) buah;
 - d. *Motor Modifikasi* sebanyak 2 (Dua) unit;
3. Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia dalam rangka Kampanye Sosial Lanjut Usia di berikan untuk 2 (dua) Kabupaten/Kota diantaranya Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 96 paket dengan rincian bantuan yang diberikan Kain, Selimut, Handuk, Susu dan Beras 5 Kg.
4. Bantuan Penyediaan Alat Bantu bagi Lanjut Usia Lanjut Usia sebanyak 46 buah di berikan untuk 3 (tiga) Kabupaten/Kota diantaranya Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu Selatan. Bantuan yang diberikan berupa 31 buah Kursi Roda dan 15 buah Tongkat Kaki 3.



5. Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak dalam rangka Perlindungan Sosial Respon Kasus Anak sebanyak 27 paket di 3 (tiga) Kabupaten /Kota diantaranya Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) dengan jenis Bantuan yang diberikan berupa Kebutuhan dasar, Tas Sekolah, Susu, Beras 5 Kg dan Biscuit Kaleng.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024-2026 lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meningkatkan kemandirian keluarga miskin, meningkatkan kualitas bantuan sosial kepada korban bencana serta peningkatan sarana dan prasarana panti sosial dan meningkatkan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Selama tahun 2025 pelaksanaan tugas pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan dengan cukup baik dan dapat mencapai seluruh target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka bertujuan menurunkan persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Agar target indikator kinerja tersebut mampu tercapai lebih optimal, Dinas Sosial berupaya melakukan peningkatan dalam beberapa hal untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :

1. Optimalisasi sinergitas program kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan kemiskinan.
2. Peningkatan kualitas data melalui integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) khususnya bagi keluarga miskin dan rentan dengan melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala.
3. Peningkatan partisipasi dunia usaha baik swasta, BUMN, BUMD dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Selain itu kedepannya perlu adanya peningkatan dalam beberapa hal, Baik itu berupa peningkatan kapasitas SDM bidang sosial, anggaran bidang sosial maupun koordinasi antar instansi yang terkait karena penyelesaian masalah sosial khususnya penurunan angka kemiskinan ini tidak bisa dikerjakan oleh Dinas Sosial sendiri.



Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk memperteguh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar benar diaplikasikan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2025, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Palembang, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan



Prof. Dr.H.Achmad Tarmizi, Ph.D
Pembina Utama (IV/e)
NIP.19660609 1995121001

